

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan negara yang ditandai dengan diterbitkannya Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terus mengalami perkembangan berarti setiap tahunnya. Salah satu bagian dari reformasi keuangan negara adalah reformasi dibidang akuntansi pemerintahan yaitu perubahan dari basis akuntansi kas ke basis akuntansi akrual. Dengan perubahan ini, diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pada Undang–Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 Ayat (1), menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual paling lambat dilaksanakan selambat–lambatnya dalam 5 (lima) tahun, namun dikarenakan berbagai kendala, hingga tahun 2008 amanat tersebut masih belum dapat dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual / *Cash Toward Accrual* (CTA) berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Ini berarti bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual akan dimulai pada tahun 2015.

Penerapan basis akrual dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan sudah merupakan suatu keharusan, namun bukan berarti penerapan berbasis akrual dapat dengan mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya tantangan. Penerapan tersebut harus dilakukan secara hati – hati dengan persiapan yang matang terkait dengan peraturan, infrastruktur, serta sumber daya manusia.

Terkait sumber daya manusia, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempunyai andil besar dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Maju atau berkembangnya suatu organisasi ditentukan oleh bagaimana kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia didalamnya. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya.

Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas terutama dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah (Cahyadi, 2009). Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan masalah khususnya dalam laporan keuangan daerah. Hal ini dapat diperparah dengan kesalahan penempatan formasi pegawai yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan tupoksi apalagi rendahnya dorongan untuk belajar lebih jauh dari pegawai tersebut.

Selain indikator pendidikan, adanya pelatihan atau sosialisasi sangat diperlukan untuk menguatkan komitmen, serta dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya itu sendiri. Dengan pelatihan atau sosialisasi yang diikuti oleh pegawai akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam hal ini tugas – tugas yang terkait dengan penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah (Cahyadi, 2009). Secara umum, melalui program sosialisasi diharapkan semua pemangku kepentingan memahami implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara baik.

Selain indikator pendidikan dan pelatihan atau sosialisasi, pengalaman kerja pegawai juga dapat dipercaya dalam penilaian kualitas sumber daya manusia. Purnamasari (2005) mengatakan bahwa seorang pegawai yang memiliki pengalaman kerja atau “*jam terbang*” yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mampu mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab timbulnya kesalahan tersebut. Sementara itu menurut Cahyadi (2009) bahwa masa kerja yang lebih lama, baik eksekutif maupun legislatif dapat menunjukkan bahwa pegawai telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Tingginya pengalaman kerja pegawai yang sesuai dengan bidang akuntansi akan dengan mudah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah di bidang pemerintahan khususnya penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Ibukota Indonesia dengan luas wilayah 661,26 km². Terletak antara 6⁰, 12’ lintang selatan dan 106⁰, 48’ bujur timur serta 7 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta yakni,

sebelah selatan berbatasan dengan Sawangan dan Kota Depok, sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang, sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, serta sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima kota yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Setiap kota administrasi terdiri dari beberapa kecamatan dan kelurahan.

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan kota pesisir modern yang ada di wilayah ibukota Jakarta. Dikatakan kota pesisir dikarenakan kondisi wilayahnya yang berbatasan dengan laut jawa dan sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Terdapat pelabuhan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yakni Pelabuhan Tanjung Priok. Kota Administrasi Jakarta Utara juga terdapat banyak perusahaan yang berkembang pesat dan bergerak di berbagai bidang industri maupun non industri, disanalah merupakan pintu masuk kegiatan ekspor dan impor. Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki Kantor Pemerintahan Kecamatan sebanyak 6 (Enam) Kantor Kecamatan dan memiliki Kantor Pemerintahan Kelurahan sebanyak 30 (tiga puluh) Kantor Kelurahan.

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu kota yang pada akhirnya juga akan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Penerapan SAP Berbasis Akrua di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta selalu menyelenggarakan sosialisasi maupun pendidikan dan pelatihan di bidangnya masing – masing bagi para aparatur sipil negara sebagai wujud dari misi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta yakni meningkatkan profesionalisme aparatur Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara. Terkait sumber daya manusia, beberapa daerah yang mulai menerapkan SAP Berbasis Akrua memiliki kendala atau hambatan awal berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional, dan berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dapat dilihat dari indikator latar belakang pendidikannya, adanya pelatihan dan sosialisasi di bidang keuangan yang pernah diikuti, maupun pengalaman kerja SDM di bidang keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat pemahaman akuntansi berbasis akrual para penyusun laporan

keuangan pada Kantor Pemerintahan (Kecamatan dan Kelurahan) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dilihat dari segi pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Penelitian ini relevan mengingat adanya perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis kas menjadi SAP berbasis akrual sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat pemahaman akuntansi berbasis akrual para penyusun laporan keuangan jika dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan sosialisasi serta pengalaman kerja?
2. Sejauh manakah pemahaman akuntansi berbasis akrual para penyusun laporan keuangan pada Kantor Pemerintahan (Kecamatan dan Kelurahan) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui adakah perbedaan tingkat pemahaman akuntansi berbasis akrual para penyusun laporan keuangan jika dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan sosialisasi, serta pengalaman kerja.
2. Mengetahui sejauh mana pemahaman akuntansi berbasis akrual para penyusun laporan keuangan pada Kantor Pemerintahan (Kecamatan dan Kelurahan) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat, dan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bahan masukan kepada pihak yang terkait yakni bagian akuntansi / penatausahaan keuangan yang ada pada Kantor Pemerintahan (Kecamatan dan Kelurahan) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara serta dapat meningkatkan pemahaman pegawai terhadap akuntansi berbasis akrual.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya terkait penelitian akuntansi berbasis akrual serta dapat memberikan manfaat berupa pengembangan disiplin ilmu dibidang akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu, pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkait penerapan akuntansi berbasis akrual.